

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan pertarungan di sebuah negara demokrasi yang diikuti oleh aktor-aktor politik dan partai politik, jika pemilu diibaratkan sebuah perlombaan maka pasti ada yang menang dan kalah kalah dan menang itu merupakan suatu hal yang lumrah di dalam pemilu. Tidak ada sebuah Negara demokrasi yang tidak menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan public dengan melibatkan warga Negara yang berhak memilih. Salah satu syarat sebuah negara dapat dikatakan menganut sistem demokrasi adalah dengan melaksanakan pemilu. dengan pemilu maka akan tercipta pemerintahan yang memiliki kredibilitas, mampu memahami aspirasi rakyat, mampu mewujudkan kedaulatan rakyat serta terjadi regenerasi kepemimpinan (Chusnul dan Reni, 2013). Pemilu merupakan perwujudan dari prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pentingnya format pemilu di dalam sebuah negara yang demokratis akan membawa dampak pada perubahan serta pengaruh mendasar kepada rakyat dalam jangka waktu tertentu baik secara local maupun nasional.

Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Selain itu pemilu dapat dikatakan pula sebagai langkah awal untuk mewujudkan perbaikan demokrasi di Indonesia dan dianggap sebagai tahap pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi negara ini. Pemilu

merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat. Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan pemilu serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif sekaligus juga memilih calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode lima tahun kedepan, sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terdapat 16 partai politik nasional peserta pemilu serta 4 partai politik lokal.

Berdasarkan situs Web KPU RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu yang berjumlah 20 partai, yakni 16 partai politik nasional peserta pemilu dan ada 4 partai politik lokal (KPU RI, 2019). Dari jumlah peserta partai politik tersebut terdapat empat partai pendatang baru untuk pemilu 2019. Empat partai tersebut yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Gerindra) (Hanafi, 2018). Partai pendatang baru tersebut termasuk kedalam partai politik nasional sama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI. Kemudian empat partai lokal diantaranya Partai Aceh, SIRA, PD Aceh dan juga PNA (KPU RI, 2019).

Kemunculan partai baru dalam Pemilu 2019 bukan merupakan fenomena pertama kali sejak era reformasi. Masuknya partai politik baru dalam pemilu 2019 membuat ruang persaingan semakin sengit karena akan

menyebabkan perebutan pasar pemilih. Partai pendatang baru pada pemilu akan bersaing dengan partai lama yang mana partai lama cenderung sudah bisa mempertahankan eksistensinya pada pemilu yang sudah dibuktikan melalui keberhasilan mereka dalam memperoleh kursi di parlemen (Hanafi, 2018).

Maka dari itu, untuk memenangkan kompetisi di ajang pemilu para peserta partai politik saling bersaing antara satu dengan lainnya dengan mengaplikasikan berbagai strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat sangatlah di perlukan, karena masyarakat merupakan sumber keberhasilan dari suatu strategi yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu masyarakat juga sangat berperan penting dalam perolehan hasil suara yang diperoleh partai politik dalam pemilihan umum. Komunikasi politik sebagai bagian dari system politik merupakan satu konsepsi yang menyatakan bahwa semua gejala sosial, termasuk gejala komunikasi dan politik, adalah saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Aminulloh, 2010).

Menurut Boyne (2009: 1273-1284) menyebutkan bahwa kecenderungan studi akademis selama ini memang menunjukkan bahwa petahana memiliki resiko kekalahan yang kecil, dikarenakan petahana dapat memanfaatkan pengaruh media dan dukungan kondisi ekonomi. Selain itu, Carmichael (1990:713-726) dan Ragsdale (1981: 201-218) juga mengungkapkan bahwa petahana memiliki popularitas yang tidak diragukan lagi yang akan membuat penantang atau lawan susah untuk mengatasinya.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada pelaksanaan pileg di dapil 1 Provinsi Aceh 2019 ternyata hal ini tidak berlaku, dikarenakan perolehan hasil yang menunjukkan kekalahan petahana terhadap kandidat baru.

Peluang petahana dalam setiap kontestasi pemilu, memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilu. Petahana selaku yang pernah menjabat sebelumnya di suatu daerah lebih di kenal masyarakat figurnya, karena pernah menjabat sebelumnya. Tingkat keterpilihan kembali petahana dalam sebuah kontestasi pemilu tahun 2019 ini di tentukan oleh beberapa faktor. Namun, yang memiliki andil besar adalah kinerjanya selama menjadi DPR-RI sebelumnya. Hal inilah yang terkadang di lupakan oleh petahana sendiri. Kinerja memiliki pengaruh besar di dalam presepsi di masyarakat, karena masyarakat sudah merasakan langsung bagaimana rasanya setelah memilih H.Muslim Ayub, S.H. M.M sebagai DPR-RI Dapil 1 Aceh pada pemilu 2014 sebelumnya.

Petahana memiliki kesempatan menang dalam pemilu lebih besar karena selama menjabat kandidat petahana dapat melakukan *soft campaign*. Kandidat petahana tentu tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah bagi petahana dalam pelaksanaan kampanye. Sejatinya petahana sebagai pemegang kendali kekuasaan akan mudah memenangkan pertarungan dibandingkan kandidat baru dengan keistimewaan yang dimiliki oleh petahana dan tidak dimiliki oleh kandidat baru. Namun kondisi berbeda terjadi di Dapil Aceh 1, dimana dari Partai

Amanat Nasional (PAN) petahana yang mencalonkan kembali pada Pileg 2019 justru mengalami kekalahan dari kandidat yang baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekalahan petahana (H. Muslim Ayub, S.H. M.M) dan menangnya kandidat baru (H. NAZARUDDIN DEK GAM, SH) pada Pileg 2019 di Dapil Aceh 1. Penelitian tentang faktor kekalahan petahana dan menangnya kandidat baru, penulis mengambil judul penelitian tentang “Jatuhnya Petahana Dan Menangnya Kandidat Baru Di Pemilu 2019: Studi Kasus Terhadap Caleg Pan (H. Muslim Ayub, Sh., Mm Dan H. Nazaruddin Dek Gam, Sh) Untuk DPR RI Dapil Aceh 1”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan yang ada di atas, penelitian ini penelitian ini merumuskan bahwa permasalahannya adalah petahana yang priode sebelumnya menang, seharusnya mempunyai potensi menang akan tetapi kalah karena adanya pendatang baru. Jadi dari realita politik yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengajukan pertanyaan “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan H. Muslim Ayub, SH., MM sebagai petahana dan kemenangan H. Nazaruddin Dek Gam, SH sebagai pendatang baru di Dapil Aceh 1”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab Jatuhnya Petahana Dan Menangnya Kandidat Baru Di Pemilu 2019: Studi Kasus Terhadap Caleg Pan (H. Muslim Ayub, Sh., Mm Dan H.

Nazaruddin Dek Gam, Sh) Untuk DPR RI Dapil Aceh 1.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut peneliti, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai jatuhnya petahana menangnya kandidat baru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca dalam memahami jatuhnya petahana menangnya kandidat baru dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Toeritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk penelitian tentang jatuhnya petahana menangnya kandidat baru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 20 literatur review yang bersumber dari artikel jurnal yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Tujuan dari analisis kajian pustaka atau literature review ini adalah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapat kebaruan dalam penelitian ini.

Literatur pada penelitian ini peneliti bagi menjadi empat klasifikasi. *Pertama*, Teori Kubus Kekuasaan/*Powercube Theory* yang terdiri dari 7 artikel jurnal yaitu dari Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019), Chalik (2017), Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar (2017), Chalik (2016), Batubara & Asrinaldi (2018), Nasir (2015), dan Kriyantono, Ramadhan, & Setiawan (2015). *Kedua*, faktor kemenangan petahana dengan 4 artikel jurnal yaitu dari Boro (2010), Khoiron & Siboy (2018), Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018), Yusra & Darmawan (2017). *Ketiga*, faktor kegagalan petahana terdiri dari 3 artikel jurnal yaitu dari Abdulrahman (2015), Hidayat, Prasetyo, & Yuwana (2018) serta Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017). *Keempat*, faktor kemenangan pendatang baru sebanyak 6 artikel jurnal yang ditulis oleh Sanjaya (2017), Hasan, Hasrullah & Sultan (2018), Putri & Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017), Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2019), serta Gunawan, Bainus & Paskarina (2020).

Menurut Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019), ditinjau dari perspektif *powercube*, dalam pemilihan kepala desa di Simalungun Sumatera Utara, menghasilkan temuan bahwa dalam pemilihan kepala desa, kekuatan tersembunyi menjadi point penting. Hal tersebut karena tokoh masyarakat yang biasanya menjadi kekuatan tersembunyi memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam kampanye.

Menurut Chalik (2017), ditinjau dari perspektif teori *powercube*, dalam pemilu, terutama pilkada di Indonesia, terdapat 3 bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi kemenangan petahana. Pertama, bentuk

kekuasaan yang terlihat (*visible power*). Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*). Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*).

Selanjutnya Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar (2017) lebih memperjelas dimana dalam pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015, keterlibatan elit local cukup berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik. Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Sementara itu, tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada.

Dari penelitian yang dilakukan Chalik (2016) dijelaskan bahwa dalam pemilu kepala daerah di Jawa Timur, kekuasaan petahana dalam mengambil dukungan dari elit local lebih besar dikarenakan biasanya beberapa petahana juga berasal dari kalangan kiai dan santri, sehingga mempermudah akses dalam menerobos jaringan politik hingga di level basis. Dalam konteks teori *powercube*, pada ruang dan eksistensi kekuasaan, elit local yang berbasis pesantren bersinergi dengan kekuatan politik, terutama dalam upaya mendukung petahana untuk kembali menang dalam kontestasi pemilu.

Sejalan dengan penelitian Chalik (2016) , Batubara & Asrinaldi (2018) menyatakan bahwa di Mandailing Natal. Hubungan klientelistik ini termasuk dalam invisible power dalam teory powercube. Namun, seperti yang terjadi di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, pola hubungan klientelistik dimanfaatkan hanya untuk meningkatkan partisipasi pemilu tanpa ada tujuan politik tertentu.

Nasir (2015) juga menyebutkan bahwa faktor sosiologis agama dalam hal ini Islam, dan organisasi keagamaan seperti NU, Persis dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Disamping itu, adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik.

Menurut Kriyantono, Ramadhan, & Setiawan (2015), media massa menjadi kekuatan tersembunyi dalam pertarungan politik pada Pilkada Jawa Timur tahun 2015. Dalam pemilu tingkat local di Jawa Timur tahun 2015, Penyebaran informasi melalui media telah dicampuri kepentingan lain. kepentingan elit politik dan elit local membumbui penyebaran informasi yang kurang baik sehingga menyebabkan turunnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Boro (2010), menangnya kembali kandidat anggota legislatif petahana di Kabupaten Kupang tahun 2009 dikarenakan dukungan aspek figure kandidat dan aspek partai politik. Hal yang paling urgen adalah

kandidat mampu membangun relasi yang baik dengan pemilih yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama. Selain itu, kandidat cepat respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan kandidat juga konsisten pada janji politiknya. Situasi ini diperkuat dengan partai politik memberi persetujuan/restu politik bagi kandidat legislatif petahana untuk bertarung lagi dalam pemilu.

Khoiron & Siboy (2018) juga menarik kesimpulan bahwa keterpilihan para petahana dalam pilkada tahun 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang didukung dari faktor modal politik atau modal social yang positif dimata public, kampanye keberhasilan petahana dalam pembangunan infrastruktur, memaksimalkan program-program Bina Desa, kegiatan *door to door* kerumah warga, dan soliditas para kader dan relawan petahana.

Menurut Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018), Strategi yang digunakan incumbent dalam mempertahankan kekuasaanya pada pemilukada Sulawesi Barat tahun 2011 antara lain: strategi kampanye berjalan dan manajemen tim yang berhasil berjalan efektif. Kampanye yang berjalan sejak incumbent tercermin dari cara incumbent dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Incumbent di Sulawesi Barat relatif berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi manajemen tim yang sukses adalah cara informan mengambil tim yang mengkomunikasikan kesuksesannya selama masa jabatan gubernur di periode kedua.

Berbeda dengan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya, Yusra & Darmawan (2017) menyatakan bahwa Tindakan manipulasi dilakukan dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015, yang bertujuan untuk menggagalkan calon lain sehingga kemenangan petahana lebih mudah diraih karena hanya melawan calon “boneka”, terjadi karena adanya kepentingan memenangkan petahana dan pasangan calon lain dinilai berpotensi menyulitkan petahana jika tidak digagalkan maka caleg lain atau pendatang baru yang akan menang .

Menurut Abdulrahman (2015), terdapat beberapa alasan atas kegagalan caleg pertahanan pada pileg 2014 di Jawa Tengah, yaitu ketidakmampuan caleg petahana dalam menghadapi kompetisi internal dengan sesama caleg dalam satu partai. Pragmatisme pemilih, penyelenggara pemilu yang kurang profesional merupakan faktor-faktor yang memberikan sumbangan terhadap kekalahan caleg petahana.

Sedangkan Hidayat, Prasetyo, & Yuwono (2018), menyebutkan bahwa kekalahan telak incumbent dalam pilkades di Desa Tanjung membuktikan bahwa penggunaan uang dan penguasaan lembaga negara tidak berbanding lurus dengan banyaknya suara yang diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa masih ada hubungan patron-klien yang dapat memengaruhi pemilih di pedesaan. Dalam hal ini, kepala desa terpilih merupakan termasuk golongan elite desa yang berasal dari golongan yang menjaga kesadaran hubungan patron-klien warga dari jasa orang tua terdahulu saat menjabat kepala desa dan Karakter masyarakat di Desa

Tanjung yang masih memiliki ikatan dengan nilai-nilai Jawa menjadi salah satu sebab penyebab keuntungan dalam konteks mengambil hati rakyatnya.

Sementara itu, temuan Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017) dari analisis yang dilakukan pada pemilu tingkat local di Indonesia, menunjukkan bahwa semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan petahana dan semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan petahana. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan petahana.

Menurut Sanjaya (2017), dalam pendekatan marketing politik yang digunakan pendaftar baru pada pileg di Dapil Lamandau dibagi menjadi tiga yaitu *pull* marketing, *push* marketing dan *pass* marketing. Dalam melaksanakan pendekatan marketing tersebut target utamanya adalah perempuan karena program yang dibawa berkaitan dengan perempuan. Selain menggunakan marketing politik juga menggunakan influencer tokoh yang berpengaruh untuk menarik perhatian masyarakat.

Menurut Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018), strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tenri Olle Yasin Limpo dan Adnan Purichta Ichsan dalam pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 sebagai wajah baru dalam pilkada adalah diawali dengan mengamati permasalahan, ketokohan dan kelembagaan, perencanaan dan pembuatan program, mengambil tindakan

komunikasi dan evaluasi program kerja. Namun, hasil pemilu menunjukkan bahwa Adnan Purichta Ichsan menang sebagai kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2015. Walaupun kategori strategi yang dilakukan mereka sama, namun dalam kategori evaluasi program kerja, Hasan Hasrullah terjadi miss komunikasi dalam tim dan terbatasnya dana. Sementara itu, jaringan komunikasi Adnan Purichta Ichsan dari tingkat kabupaten hingga desa sangat rapi.

Faktor Kemenangan Koalisi sekaligus pendatang baru Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 menurut Putri & Qodir (2017) dipengaruhi beberapa factor. Faktor-faktor tersebut yaitu, adanya koalisi partai politik yang telah dibangun oleh partai politik pendukung dan pengusung pasangan, partisipasi politik yang meningkat dibandingkan pada pemilu tahun 2010, dan Modalitas. Modalitas tersebut diantaranya modal politik, modal social modal budaya dan modal ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017) menyebutkan bahwa kemenangan pendatang baru sekaligus Bupati perempuan pertama di Lampung Chununia Chalim pada Pilkada Lampung Timur tahun 2015 dipengaruhi oleh factor latar belakang keluarga, beliau merupakan keturunan dari kyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Lampung Timur. Kekuatan figur ini memanfaatkan dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) di bidang keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU), kelompok ibu-ibu pengajian (Fatayat), dan Gerakan Pemuda Ansor.

Sedangkan Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2017) menyatakan bahwa kemenangan Yan Anton Ferdian sebagai wajah baru di Pilkada Kabupaten Banyuasin tahun 2013 bersumber dari kekuatan dinasti politik yang dimilikinya. Kemenangan tersebut didapat kekuatan modal sosial sang ayah. Modal yang dimiliki oleh Yan Anton Ferdian berupa modal sosial sekaligus simbolik, modal politik dan modal ekonomi. Modal ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai strategi. Selanjutnya penerapan strategi tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Banyuasin berdasarkan pendekatan psikologis, sosiologis dan rasional, sehingga dengan itu dapat memenangkan pemilihan tersebut.

Menurut Gunawan, Bainus, & Paskarina (2020) pada konteks pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, strategi yang digunakan pasangan calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) sebagai pendatang baru untuk melawan petahana adalah strategi ofensif. Hal ini dikarenakan Pasangan Jadin mutlak harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagan Raya dalam rangka membuat pemilih berpaling dari sebelumnya mendukung dinasti politik yang dibangun Ampon Bang beralih mendukung mereka. Dengan demikian strategi ofensif seperti perluasan pasar dan menembus pasar dilakukan dalam rangka meraup pemilih yang sebelumnya kerap mendukung dinasti politik petahana. Berikut ini peneliti sajikan taksonomi literature review dalam penelitian ini.

Tabel. 1.1. Ringkasan Literatur Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Teori Kubus Kekuasaan/ <i>Powercube Theory</i>	Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019) Chalik (2017) Fadli, Bailusy, Nas, dan Zulfikar (2017) Chalik (2016) Batubara & Asrinaldi (2018) Nasir (2015) Kriyantono, Ramadhan, & Setiawan (2015)	Dalam Teori Kubus Kekuasaan, dimensi bentuk kekuasaan seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan suara yang lebih terutama bentuk kekuasaan tersembunyi, dan tidak terlihat dengan memanfaatkan pihak-pihak atau kegiatan yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, terutama elit agama dan elit local.
2.	Faktor Kemenangan Petahana	Boro (2010) Khoiron & Siboy (2018) Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018) Darmawan & Yusra (2017)	Faktor utama yang menjadi faktor kemenangan petahana dalam pemilu adalah dukungan dari partai politik, aspek figure kandidat serta kamoanye berjalan yang dilakukan petahana selama masih memegang jabatan dalam politik.
3.	Faktor Kegagalan Petahana	Abdulrahman (2015) Hidayat, Prasetyo, Yuwana (2018) Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017)	Faktor yang menyebabkan seorang petahana gagal dalam meraih kembali kursi kekuasaan dalam pemilu adalah adanya kompetisi internal sesama caleg, ketidakpuasan pemilih baik terhadap kinerja maupun kepribadian calon, buruknya political marketing, patron-klien pendatang baru dan juga adanya isu-isu negative yang berkembang di masyarakat.
4.	Faktor Kemenangan Pendatang Baru	Sanjaya (2017) Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018) Putri & Qodir (2017) Hertanto & Mulyaningsih (2017) Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2017) Gunawan, Bainus & Paskarina (2020)	Faktor kemenangan pendatang baru didukung oleh marketing politik yang baik dengan cara memetakan segmentasi, targetting dan positioning, kemudian strategi komunikasi yang kompak sampai ke tingkat bawah, hingga modalitas yang cukup, termasuk modal social, budaya, dan ekonomi.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

1.6 Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan topik yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan diantaranya yaitu : teori Kekuasaan Kubus (*The Power Theory*), teori Patai Politik, serta Caleg, Petahana,

Pendatang Baru dan Pemilu.

1.6.1 Teori Kekuasaan Kubus (*The Power Theory*)

Teori Powercube (Kubus Kekuasaan) dicetuskan oleh John Gaventa, yang mengambil akar dari teori gurunya yaitu Steven Lukes (Halim,2014:52). Lukes menjelaskan teori kekuasaan tiga Dimensi dalam bukunya yang berjudul *Power A Radical View*, dalam buku tersebut dijelaskan tiga dimensi tentang kekuasaan. Yaitu satu dimensi menjelaskan tentang kekuasaan yang hanya berfokus pada satu hal saja, yaitu tindakan para aktor dalam mengambil keputusan, dua dimensi juga masih berfokus pada kepentingan subjektif dalam bentuk pilihan atau bahkan keluhan, sedangkan tiga dimensi memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut. Dari teori kekuasaan Tiga Dimensi tersebut kemudian menginspirasi Gaventa untuk menciptakan teori Powercube ini yang menjelaskan kekuasaan sendiri terdiri dari tiga sisi yaitu level, ruang, dan bentuk. Konsep teori Powercube ini sendiri berangkat dari persoalan kekuasaan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, tetapi belum ada sebuah kajian yang mendalam dan bahkan komprehensif tentang kekuasaan itu sendiri.

Secara umum menurut Gaventa J. (2006) kekuasaan mempunyai tiga dimensi (yaitu :

- a. Dimensi Level (Dimensi Tingkatan), yang terdiri atas:
Lokal, Nasional, dan Global.

- b. Dimensi Space (Dimensi Ruang), yang terdiri atas: Ruang Tertutup (closed), Ruang Yang Diperkenankan (invited), dan Ruang Yang Diciptakan atau Diklaim (claimed/created).
- c. Dimensi Forms (Dimensi Bentuk), yang terdiri atas: Bentuk Yang Terlihat (visible), Bentuk Tersembunyi (hidden), dan Bentuk Tidak Terlihat (invisible).

Menurut John Gaventa (2006) Dimensi level atau Dimensi Tingkatan membicarakan tentang level atau tingkatan kekuasaan yang hendak dikaji yang terdiri dari global, nasional dan lokal. Dalam menganalisis level kekuasaan ini, tidak bisa terpisah, sehingga sebuah kekuasaan dalam skala lokal harus meliputi analisis di tingkat nasional bahkan global. Contohnya ketika kita berbicara aspek ekonomi politik pemerintahan lokal, persoalan pengambilan lahan secara paksa oleh pemerintah karena untuk kepentingan ekonomi yang investor utama adalah agen-agen global, tidaklah cukup hanya membaca realitas politik lokal semata, tapi juga konstelasi politik global dan nasional.

Menurut John Gaventa (2006) terdapat tiga jenis Ruang, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang tertutup (*closed*) adalah ruang dimana ada sekompok aktor atau elite yang difungsikan untuk mengambil keputusan tanpa adanya pihak lain dan tanpa adanya keinginan untuk membuka lebih luas ruang untuk kemungkinan masuknya pihak lain.
- b. Ruang tersediakan (*invited*) adalah ruang yang dimana sengaja dibuat oleh para penentu kebijakan baik pada level Negara. Daerah ataupun desa baik yang disahkan secara hukum ataupun tidak dan bertujuan untuk mengundang lebih banyak pihak duduk bersama memutuskan sesuatu, ruang ini diatur untuk kegiatan para kelompok dan untuk konsultasi. Ruang yang diundang dapat diatur artinya masih dilembagakan dalam bentuk konsultasi satu kali.
- c. Ruang terciptakan (*claim*) adalah ruang yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat umum yang diakibatkan oleh kekecewaan atas ruang-ruang yang telah tersedia diwilayah mereka untuk berproses keterlibatan atau dibangun secara khusus untuk menyediakan ruang bagi aktivitas mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Akan tetapi ruang yang dikalim oleh aktor ini kurang kuat, untuk menciptakan sesuatu yang lebih banyak.

Sedangkan menurut John Gaventa (2006) dimensi forms terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan nyata (visible power) merupakan Tingkatan yang dapat mencakup beberapa aspek kekuatan yang terlihat seperti, kekuasaan yang diatur secara hukum, memiliki struktur, kewenangan, institusi, dan prosedur dalam pengambilan keputusan secara jelas. Strategi ini, menargetkan untuk mengubah siapa, bagaimana dan apa dari pembuatan kebijakan sehingga proses kebijakan yang terjadi lebih demokratis dan akuntabel dan melayani kebutuhan dan hak-hak masyarakat.
- b. Kekuasaan tersembunyi (Hidden power) adalah dimana institusi tertentu yang berkuasa untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mengontrol siapa yang dapat mengambil keputusan dalam sebuah agenda.
- c. Kekuasaan yang tak terlihat (invisible power) adalah kekuasaan yang paling terdalam dan tidak terlihat, dimana kekuasaan yang tidak terlihat ini, mampu membentuk batasan-batasan proses keterlibatan secara ideologis dan psikologis.

1.6.2 Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela

oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan juga negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang mana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2007).

Menurut Al-Hamdi, (2020) Partai politik memiliki konsep dan klasifikasinya antara lain sebagai berikut:

a. Konsep tentang Partai Politik.

Menurut Al-Hamdi, (2020) dalam Neumann (1963: 352-353) “secara konseptual partai politik merupakan lembaga artikulatif yang mewakili kepentingan politik masyarakat dengan tujuan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah serta berkompetisi untuk meraih suara dan dukungan pemilu”. Sedangkan partai politik diciptakan sebagai penghubung antara *civil society* dengan Negara untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Namun Poguntke (2006: 396) partai politik harus membutuhkan “*collateral organisations*” dengan tujuan memperluas jangkarnya di masyarakat melampaui basis konstituensinya dan sebagai alat untuk dapat menstabilkan basis pemilih tradisionalnya dalam daerah tersebut. Partai politik harus mampu

merekrut dan melahirkan para pemimpin yang lebih baik untuk mengelola pemerintahan yang sesuai keinginan rakyat”.

b. Klasifikasi Partai Politik.

Menurut Al-Hamdi, (2020) Partai politik dapat di klasifikasikan berdasarkan dua hal yaitu berdasarkan orientasi sosio-ideologis dan berdasarkan status kekuatan organisasi partai. Mayoritas partai politik berdasarkan pertimbangan ideologis dan status kekuatan organisasinya menjelaskan tentang klasifikasi partai berdasarkan ideologi sangat beragam, sementara klasifikasi berdasarkan status kekuatan organisasi partai yang menggunakan teori Feith (1957). Menurut Liddle (2003: 5), Baswedan (2004), Ufen (2006), Mietzner (2013) & Al-Hamdi, (2020), ada beberapa klasifikasi spectrum ideology partai politik di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Table 1.2 klasifikasi spektrum ideology partai politik di Indonesia

ILMUWAN	BENTANGAN SPEKTRUM IDEOLOGI				
Liddle (2003)	Nasionalis-Soekarno	Universalis	Islam		
Baswedan (2004)	Nasionalis-Sekuler	Islam Fremdly	Islam Inklusif	Islam	
Ufen (2006)	Sekuler	Islam Moderat	Islam moderat	Campuran modernis dan tradisional	Islam modernis
Mietzner (2013)	Sekuler	Ideologi Moderat	Ideologi Moderat	Islam	
Al-Hamdi, (2020)	Nasionalis-Sekuler	Nasionalis-Muslim	Nasionalis-Muslim	Nasionalis-Islamis	

Sumber : Buku Ambang Batas Pemilu, 2020.

Dari tabel di atas, telah dijelaskan bahwa partai politik dibagi secara ideologis kedalam tiga spectrum yaitu nasionalis-sekuler, nasionalis-

Muslim, dan nasionalis-Islamis. Menurut Al-Hamdi, (2020) ”Pemilihan tiga klasifikasi tersebut didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan tiga varian masyarakat Indonesia akhirakhir ini, yaitu abangan, santri, dan jemaah tarbiyah. Kedua, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan kekuatan utama aspirasi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, partai-partai yang berada di dalam ketiga kekuatan politik tersebut telah berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan selalu memiliki kursi representasinya secara terus-menerus di parlemen baik di tingkat nasional maupun local”.

Hafied Cangara (dalam Labolo dan Ilham, 2015) menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu :

- a. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan guna membangun kekuatan mayoritas.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk mampu menjadi institusi yang dimanis, eksis dan berkelanjutan, partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan juga dibesarkan sehingga mampu menjadi menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus sebagai representasi dari sejumlah orang ataupun kelompok.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Untuk mampu menduduki jabatan-jabatan public, para calon yang diajukan oleh partai politik didukung secara konkret oleh partai politik tersebut. Dari posisi tersebut, partai politik mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi ataupun mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup

kekuasaannya, bahkan mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolektif partai.

1.6.3 Caleg, Petahana, pendaatang baru, dan Pemilu

Sebelum membahas pengertian calon legislatif ada baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu bias. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan lembaga legislatif. Salah satunya adalah Menurut Budiarjo (2006:173) badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan dewan perwakilan rakyat. Sedangkan menurut Syafii (2002:45) Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing-masing Negara.

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada dasarnya lembaga legislatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum (Public policy) yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk undang-undang, dan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum.

Menurut Nawawi (2015) Petahana sebagai pemegang jabatan yang kembali ikut berkontestasi akan mendapat keuntungan dalam sebuah pemilihan umum. Keuntungan yang didapatkan atas kinerja dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat sebelumnya. Petahana dalam hal ini mendapatkan beberapa keuntungan seperti penguasaan atas data, penguasaan atas layanan dan penguasaan atas citra. Beda halnya dengan pendatang baru Pendatang baru merupakan seorang yang baru menempati suatu tempat yang belum pernah ia tempati sama sekali. Pendatang baru juga merupakan fenomena yang mengejutkan pada kontestasi pemilu, dimana bisa mengalahkan petahana yang seharusnya berpeluang lebih besar menang, malah kalah dengan munculnya kandidat baru dalam pemilu 2019.

Sistem pemilu merupakan suatu proses menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh peserta pemilu. Rumusan pemilu yang digunakan, struktur pemungutan suara, dan besaran dapil atau daerah pemilihan merupakan variable-variabel kunci dalam sistem pemilu. Dalam menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi di badan legislatif, pemilihan sistem pemilu merupakan hal yang sangat menentukan siapa yang terpilih dan juga partai mana yang akan meraih kekuasaan (Reynolds, Reilly, & Allis, 2005).

Sebagai kompetisi politik, terdapat sejumlah aktor yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu. Masing-masing aktor mempunyai fungsi dan juga posisi tersendiri yang secara bersama memiliki kewajiban menyukseskan pelaksanaan pemilu. Menurut (Sardini, 2011), aktor-aktor tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Aktor Utama Pemilu

a. Pemilih

Dalam konteks Indonesia, diantara aktor-aktor pemilu yang ada, posisi pemilih kerap kali terpinggirkan. Daftar pemilu selalu menjadi kontroversi dalam pelaksanaan pemilu. Padahal, hak-hak politik warganegara telah dijamin dalam konstitusi, termasuk dalam hal itu adalah hak memilih dalam pemilu.

b. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya merupakan penyelenggara pemilu di Indonesia.

c. Peserta Pemilu

Baik dalam pemilu eksekutif maupun legislative, partai politik selalu menjadi pelaku dominan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Aktor Pendukung

a. Pemerintah

Keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya pengiriman logistic pemilu

ke tempat pemungutan suara, tidak akan berjalan tepat sasaran jika tidak ada dukungan yang baik dari pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Lembaga keamanan sangatlah penting dalam keberlangsungan pemilu. hal ini karena sangatlah mungkin terjadi gesekan kepentingan diantara warga masyarakat.

c. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga ini bertugas untuk mengontrol jalannya aturan yang sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

d. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu adalah LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan negara sahabat yang telah mendaftar ke KPU dan telah memperoleh akreditasi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu.

Dari semua aktor pemilu tersebut, haruslah saling bekerjasama untuk menciptakan pemilu yang sesuai dengan UUD 1945, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan fungsinya, maka penyelenggaraan pemilu akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan secara maksimal.

1.7 Defenisi Konsepsional

Konsep merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta di dalamnya meliputi keadaan suatu

individu maupun kelompok yang menjadi obyek perhatian. Konsep pada penelitian ini antara lain:

1. Powercube (kubus kekuasaan)

Powercube (kubus kekuasaan) yaitu menjelaskan kekuasaan sendiri terdiri dari tiga dimensi yaitu level, ruang, dan bentuk. Konsep teori Powercube ini sendiri berangkat dari persoalan kekuasaan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia.

2. Partai Politik

partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membele dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan juga negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

3. Sistem Pemilu

pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Petahana

Petahana adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat dan yang akan mencalonkan dirinya kembali pada pemilu selanjutnya. Kalahnya petahan merupakan suatu hal yang mengejutkan, karena secara logika persentase kemenangan petahan lebih tinggi dari pada pendatang baru, karena petahana juga mempunyai *Resors* pada saat menjabat sebelumnya.

5. Pendatang baru

Pendatang baru merupakan seorang yang baru menempati suatu tempat yang belum pernah ia tempati sama sekali. Pendatang baru juga merupakan fenomena yang mengejutkan pada kontestasi pemilu, dimana bisa mengalahkan petahana yang seharusnya berpeluang lebih besar menang, malah kalah dengan munculnya kandidat baru dalam pemilu 2019.

1.8 Defenisi Operasional

Defenisi operasional sangat penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya defenisi operasioanl ini dapat membantu peneliti dalam menentukan fokus yang ada dalam permasalahan tersebut. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Berikut defenisi

operasional yang digunakan dalam penelitian ini, dari teori *powercube* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dimensi Bentuk <i>Powercube Theory</i> (Gaventa, 2006)	a. <i>Visibel Power/ Kekuatan Terlihat</i>	- Strategi kampanye kandidat untuk meraih simpati masyarakat melalui jualan program dan <i>branding profile</i> kandidat ke masyarakat atau ke pemilih
		b. <i>Hidden Power/ Kekuatan Tersembunyi</i>	- Dukungan dari partai - Dukungan dari penyelenggara pemilu (Panwaslih serta jajarannya sampai tingkat bawah) - Politik Uang
		c. <i>Invisible Power/ Kekuatan Tidak Terlihat</i>	- Mobilisasi tokoh agama/ Priyayi/ Pondok Pesantren maupun tokoh masyarakat.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan juga interpretasi atau penafsiran terhadap realitas kehidupan yang didasarkan pada apa yang dipahami oleh peneliti. Penelitian empiris biasanya melibatkan sejumlah data lapangan/ bukti empiris yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu.

Dalam penelitian kualitatif terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu, naratif, fenomenologis, etnografis, grounded theory dan studi kasus. Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena pendekatan studi kasus sangat relevan dengan topic yang peneliti ambil. Secara definitive, studi kasus adalah jenis pendekatan untuk menyelidiki serta memahami satu, dua atau lebih dari kasus sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dibatasi oleh ruang/tempat dan waktu serta pengumpulan sumber datanya melibatkan banyak pihak supaya didapatkan pemahaman yang mendalam dan juga komperhensif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020). Studi kasus dalam penelitian ini ialah Jatuhnya Petahana dan Menangnya pendatang baru pada Pileg 2019: Studi

kasus terhadap Caleg Partai Amanat Nasional (H. Muslim Ayub, Sh., Mm Dan H. Nazaruddin Dek Gam, Sh) Di Dapil Aceh 1.

1.9.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terkait dengan topic yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini data didapatkan dari caleg petahana dan pendatang baru yang berhasil merebut kursi legislative pada pemilu 2019 di Dapil Aceh 1 yaitu, Bapak H. Muslim Ayub, Sh., Mm Dan H. Nazaruddin Dek Gam, Sh., keduanya berasal dari Partai Amanat Nasional.

b) Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan (*liberary research*) dengan menggunakan data yang tersedia yang berupa bahan-bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, undang-undang, artikel dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan topic penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang terjalin antara pewawancara atau biasa disebut *interviewer* dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai/*interviewee* yang dilakukan melalui komunikasi langsung tatap muka ataupun secara daring atau online (Yusuf, 2014 : Al-Hamdi, et al, 2020). Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber :

1. Caleg Petahana dan Caleg Pendaatang Baru yang berkontestasi dalam pemilu 2019 di Dapil Aceh 1.
2. Tim sukses Caleg Petahana dan Caleg Pendaatang Baru yang berkontestasi dalam pemilu 2019 di Dapil Aceh 1.
3. Partai PAN.
4. Panwaslih Gayo Lues.

1.9.4 Teknik Studi Dokumentasi

Dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Evendi (2020), dijelaskan bahwa teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena data berupa dokumen juga menyimpan informasi penting dan fakta yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data untuk mendapatkan

hasil yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa buku-buku, jurnal, atau gambar.

1.9.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini akan menjelaskan dari pembahasan yang universal ke pembahasan yang lebih spesifik. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020) dalam (Bogdan dan Biklen, 2007) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lainnya. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020), Proses analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini, setelah selesai pengumpulan data baik dari dokumentasi dan wawancara, data-data akan dipilih dan dipilah berdasarkan indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi Data

Pada bagian ini peneliti akan mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Analisis antar-variabel dan Verifikasi data

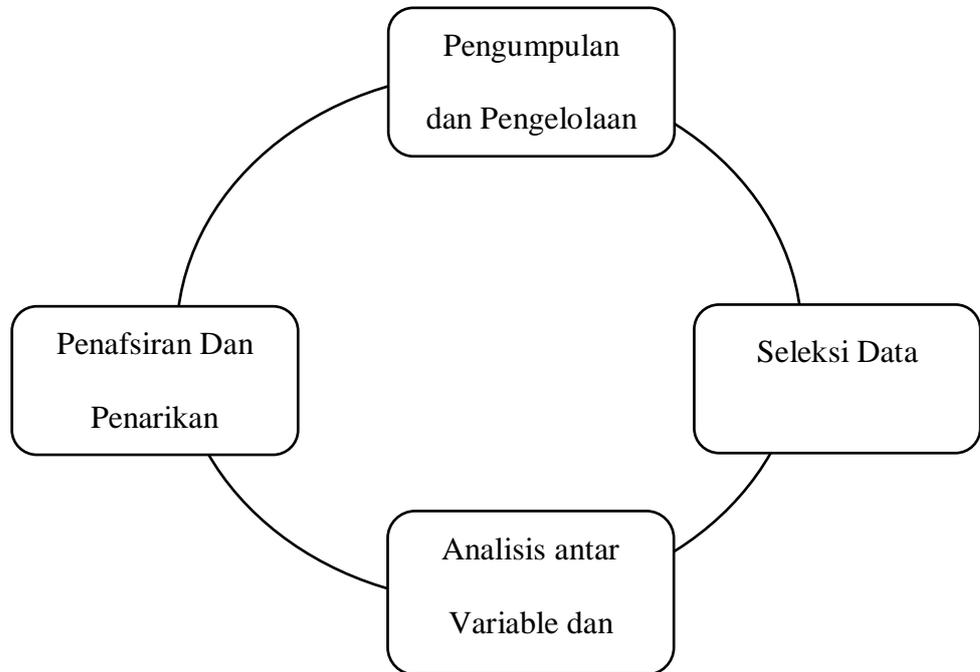
Pada bagian ini, peneliti mengaitkan temuan satu variable atau indicator dengan variable atau indicator lainnya.

d. Penafsiran dan Kesimpulan.

Pada tahap ini, peneliti mensajikan kepada pembaca dan merumuskan kesimpulan atas data-data yang telah ada, dari semua proses yang telah di lalui.

Langkah-langkah dalam analisis data menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Evendi (2020) dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Empat Langkah dalam Analisis Data



Sumber : Penelitian Kualitatif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, Efendi, 2020).

1.10 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu :

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan di bahas tentang profil H. Muslim Ayub, SH., MM Dan H. Nazaruddin Dek Gam, SH dan profil Dapil Aceh 1.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai jatuhnya petahana menangnya pendatang baru di pemilu tahun 2019.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

